

Bertemu Para Ketua SAI G20, Ketua DPR Dorong Penguatan Kerja Sama dengan Parlemen







3 Sufmi Dasco: Anugrah Karya Jurnalistik Wartawan Parlemen Harus Berkelanjutan



5 Rachmat Gobel: Indonesia Miliki Industri Pertahanan Unggul di Banyuwangi





Bertemu Para Ketua SAI G20, Ketua DPR Dorong Penguatan Kerja Sama dengan Parlemen

etua DPR RI Dr.
(H.C) Puan Maharani
bertemu dengan para
Ketua Supreme Audit
Institution (SAI) negara
anggota G20. Pertemuan bilateral
Puan dengan para Ketua SAI negara
G20 digelar di sela-sela pembukaan
Supreme Audit Instituitions 20 (SAI20)
di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8).
SAI20 yang merupakan Engagement
Group terbaru di G20 yang
diprakarsai oleh Indonesia dalam
Presidensi G20 2022.

Puan berharap ada penguatan kerja sama antara lembaga tinggi audit G20 dengan parlemen. "Saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan pertemuan pertama SAI20," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu usai menghadiri pembukaan SAI20.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga memandang sinergi serta kolaborasi antara parlemen dan SAI merupakan salah kunci utama dalam membangun akuntabilitas serta transparansi saat pemulihan pascapandemi dan pencapaian SDGs. "Parlemen akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik. Dengan dukungan SAI sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas sektor publik," katanya.

Ditambahkannya, parlemen dan SAI perlu memastikan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 secara akuntabel danberdasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Puan,



Scan QR untuk berita selengkapnya

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat pembukaan Supreme Audit Instituitions 20 (SAI20) di Nusa Dua, Bali.

proses pemulihan dapat berisiko menimbulkan kebocoran, ataupun berisiko adanya penyalahgunaan penggunaan anggaran tanpa tata kelola yang baik. "Hal ini akan berdampak menghambat proses pemulihan," sebut Puan.

Parlemen dan SAI juga diharapkan dapat mendorong akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dua topik tersebut merupakan isu yang menjadi prioritas P20 dan SAI20. "Karenanya perlu upaya lebih kuat dan terkoordinasi untuk mengakselerasi pencapaian SDGs pada masa paska pandemi. Pencapaian SDGs masih dapat dilakukan jika delivery program dan

pengeluaran (spending) pemerintah dilakukan secara efisien, efektif, dan menghindarkan misalokasi sumber keuangan negara," papar cucu Proklamator RI itu.

Kedua lembaga pun diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Puan menyebut, Parlemen dan SAI dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui berbagai kolaborasi dan sinergi. "Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas merupakan fondasi demokrasi yang dinamis," harap Politisi PDI-Perjuangan tersebut. • rnm/sf



Sufmi Dasco: **Anugerah Karya Jurnalistik Wartawan Parlemen Harus** Berkelanjutan



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Karya Jurnalistik di selasar Gedung Nusantara II, Senayan.

akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2020-2022 karena telah sukses menyelenggarakan Anugerah Karya Jurnalistik II dengan tema 'Refleksi 77 Tahun DPR RI: Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh'. Dasco menyambut baik kontestasi tersebut sembari menyampaikan dukungan terhadap acara Lomba Karya Jurnalistik dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

"Saya apresiasi terhadap kawankawan di DPR RI, rekan-rekan wartawan yang telah mengikuti Anugerah karya jurnalistik di mana tadi kita lihat ada seribuan foto dan telah diseleksi, sehingga kemudian

menjadi ratusan yang diperlombakan," ielas Dasco usai pembukaan Lomba Karya Jurnalistik bertema 'Refleksi 77 Tahun DPR RI: Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh', di selasar Geduna Nusantara II.

Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Ini merupakan tahun kedua

Anugrah Karya Jurnalistik diadakan oleh KWP, dan melibatkan para wartawan foto di lingkungan Sekretariat DPR RI dan para wartawan foto di bawah naungan KWP. Agenda ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk menginformasikan pada khalayak mengenai begitu banyak hal yang telah dilakukan DPR selama satu tahun terakhir melalui bingkai foto.

"Acara Anugrah Karya Jurnalistik di DPR RI ini, saya rasa memang mesti dilakukan secara continue untuk kemudian melihat hasil karya rekan-rekan wartawan yang ada di DPR, yang kita lihat dari tahun ke tahun hasil karyanya semakin matang," tandas Dasco yang merupakan politisi Partai Gerindra tersebut. • we/sf





PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Prattiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Ubdia Ir Aurizal, S.I.Kom, Shane Savera S.d'diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Niganne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinari Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

Upie, Hasri Mentari, Priedenick Munchen **ANALIS MEDIA** Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P. Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugaha, Sunanya, Fahmi Haffa, Safitir Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifgi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAR DISTRIBUSI

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Gus Muhaimin Kenang **Kontribusi Buya Hamka Merawat Bangsa Melalui Peluncuran Buku**



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melihat buku dan manuskrip langka koleksi Perpustakaan Nasional RI.

akil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengenang kontribusi Buya Hamka dalam konsistensi merawat bangsa, sejak lahir hingga wafatnya. Hal itu disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku 'Membaca Hamka Merawat Bangsa' karya Umar Syadat Hasibuan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

"Buku ini telah merevitalisasi pemikiran dari Buya Hamka yang sangat dahsyat. Sosok ulama sekaligus seniman dan sastrawan, yang pasti dalam konteks waktu dan zaman akan memberi kekayaan khazanah intelektual dan sastra kita," ujar Gus Muhaimin, sapaan akrabnya di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (29/8).

Selain itu, menurut Gus Muhaimin, cara Buya Hamka merawat bangsa adalah dengan cara menjadi figur yang konsisten (istiqomah) antara pemikiran dan perbuatan. Apa yang menjadi pemikiran Buya Hamka, sambung Gus Muhaimin, tercermin dari tiap tindakan keseharian.

Bahkan menurut politisi PKB tersebut, pemikiran untuk tidak mengikuti hawa nafsu untuk balas dendam politik, tercermin saat Buya Hamka berkenan untuk menjadi imam salat jenazah Bung Karno yang pernah memenjarakannya selama dua tahun empat bulan tersebut.

"Hamka adalah contoh bagi generasi saat ini termasuk tidak dendam terhadap Bung Karno meskipun dipenjara selama dua tahun. Itu pembelaiaran yang sangat dahsyat, kesabaran memaafkan, saling menghormati itu yang harus dijadikan warisan bagi kita," ujar legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Gus Muhaimin berharap sosok Buya Hamka yang

menjadi ulama, filsuf, pejuang, hingga sastrawan tersebut dapat menjadi pedoman bagi anak muda untuk meningkatkan literasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mempermudah penerbitan buku, menghilangkan pajak buku, serta memfasilitasi penyebaran buku-buku ke masyarakat di berbagai daerah melalui bantuan APBN.

"Saya kira semua (masyarakat) tidak bisa dapatkan akses karena buku mahal. Karena itu saya harapkan APBN menggratiskan buku-buku khususnya buku sejarah, sastra, dan ilmu pengetahuan," tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut. • rdn/sf





Rachmat Gobel: Indonesia Miliki Industri Pertahanan Unggul di Banyuwangi



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meninjau pabrik industri pertahanan PT Lundin Industry Invest.

akil Ketua DPR
RI Koordinator
Bidang
Industri dan
Pembangunan
(Korinbang) Rachmat Gobel meninjau
pabrik industri pertahanan milik
swasta, PT Lundin Industry Invest
yang berada di Klatak, Kalipuro,
Banyuwangi, Jawa Timur, Senin
(29/8). Pabrik tersebut sudah maju
dan berteknologi unggul.

Di pabrik tersebut, Gobel melihat salah satu produk PT Lundin Industry Invest, yakni kapal pengangkut. Kapal penumpang berkapasitas 60 orang itu anti peluru dan dilengkapi peluncur roket. Kapal ini juga dilengkapi sistem pengoperasian yang serba komputer. "Kita harus mendukung dan melindunginya untuk ketahanan nasional Indonesia dan juga memberikan devisa buat Indonesia," kata Gobel dalam keterangannya, Selasa (30/8).

Salah satu keunggulan industri pertahanan dengan merek North Sea Boats itu adalah membuat kapal boat. Bahan yang digunakan adalah komposit dengan *nano particle* sehingga ringan, lebih kuat dari metal, dan bisa melaju dengan cepat. Selain memproduksi *armored troop carrier*, PT Lundin juga memproduksi kapal patroli, kapal tank, catamaran, trimaran, amfibi, *rib*, *combat*, *drone*, dan lain-lain.

Bahkan diketahui Lundin telah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Australia, Italia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Rusia, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan disebut sesuai standar NATO dan NASA. Perusahaan ini milik pasangan suami-istri John Lundin dan Lizza Lundin. Dalam kunjungan ini, Gobel diterima oleh Lizza.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, fakta tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar mendapat perlindungan dan juga prioritas. "Tidak gampang untuk memiliki industri pertahanan yang unggul, karena teknologi militer biasanya sangat sulit untuk ditransfer dari negara-negara maju. Namun, kini ada perusahaan swasta yang sudah bisa membuatnya," tandas Gobel.

Menurut Gobel, Indonesia sedang terus berkembang untuk menjadi negara maju. Hal ini bisa dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat dan masuk ke dalam 20 negara dengan PDB terbesar di dunia, yaitu G-20. "Artinya anggaran pertahanan kita juga relatif besar. Jangan sampai anggaran yang cukup besar itu dihamburkan untuk memajukan industri pertahanan negara lain," imbuh Gobel.

"Kita juga sudah pernah mengalami terkena embargo senjata militer, sehingga kita menjadi lemah. Kini kita sudah memiliki industri pertahanan yang unggul. Jadi, jangan disia-siakan," pesan Gobel. Terlebih, imbuh Anggota Komisi XI DPR RI tersebut, Indonesia adalah negara maritim, sehingga akan membutuhkan banyak kapal boat untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. • rnm/sf



Komisi I Dorong **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Jambi**

im Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi I DPR RI
ke Provinsi Jambi yang
dipimpin Wakil Ketua
Komisi I DPR RI Bambang
Kristiono menggelar pertemuan
dengan Dirut Bakti Kominfo beserta
jajarannya di Jambi, Jumat (26/8),
guna membahas dukungan teknologi
informasi dan Komunikasi (TIK) dalam
pelayanan publik di Jambi.

Bambang menyatakan Tim Kunspek Komisi I DPR RI telah mendengarkan pemaparan Direktur Utama Bakti Kominfo RI terkait beberapa hal, yakni mengenai sebaran nasional akses internet BLU Bakti, detail sebaran nasional internet BLU Bakti, sebaran akses internet BLU Bakti di Provinsi Jambi, topologi jaringan akses internet BLU Bakti, lokasi dan detail BTS USO BLU Bakti di Provinsi Jambi, dan strategi implementasi pengembangan sistem digital BLU Bakti.

"Komisi I DPR RI mendorong Bakti Kominfo RI dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan



Scan QR untuk berita selengkapnya

Komisi I DPR RI saat pertemuan dengan Dirut Bakti Kominfo beserta jajarannya.

ekosistem digital di Jambi, khususnya dengan mekanisme kerjasama dan komunikasi yang optimal dan berkelanjutan antara Bakti Kominfo RI, pemerintah daerah, operator seluler, dan stakeholder lainnya," ucap Bambang.

Bambang menyampaikan, Komisi I DPR RI telah menerima usulan terkait *blank spot list* di 285 desa yang tersebar di sembilan Kabupaten di Provinsi Jambi. "Komisi I DPR RI juga telah menerima aspirasi dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi agar Kementerian Kominfo RI dapat mengalokasikan Dana Khusus (DAK) kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ungkap politisi Partai Gerindra itu. • dep/aha

Komisi I **Apresiasi TVRI Lampung Angkat Budaya Lokal jadi Konten Siaran**

omisi I DPR RI
mengapresiasi
Stasiun Lembaga
Penyiaran Publik
(LPP) TVRI
Lampung telah menyiapkan dan
menyiarkan konten siaran dengan

mengangkat budaya lokal sebagai program unggulan tahun ini. TVRI Lampung berhasil mengangkat budaya lokal dengan melibatkan seniman, content creator, serta masyarakat Lampung melalui program unggulan, seperti Pesona

Indonesia, Anak Indonesia, Film Asli Lampung dan Lensa UMKM. Dan pada tahun 2021, TVRI Lampung memperoleh juara ketiga Penghargaan Gatra Kencana.

"Penghargaan Gatra Kencana ini merupakan penghargaan atas produksi terbaik TVRI se-Indonesia, jadi kami apresiasi itu," kata Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan jajaran Stasiun TVRI dan Diskominfo Lampung di



Komisi I Dukung **Pembangunan Sarpras LPP TVRI Bangka Belitung**



Foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Stasiun TVRI Bangka Belitung.

omisi I DPR RI mendukung pembangunan gedung baru dan studio operasional penyiaran berbasis digital, termasuk sarana prasarana, konten, dan Sumber Daya Manusia (SDM) di TVRI Bangka Belitung. Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan berharap pembangunan sarpras ini dapat diselesaikan tahun depan.

"Kami akan terus mendukung agar pembangunan gedung sekaligus kelengkapan sarana dan prasarana pendukung studio dan pendukung lainnya yang belum dianggarkan (dapat segera mendapat anggaran). Semoga tahun ini segera diselesaikan tahun depan," kata Nico, sapaan akrabnya, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI meninjau gedung baru TVRI Bangka Belitung, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jumat (26/8).

Selain itu, Nico menyoroti kesiapan SDM dalam menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan ini membutuhkan keterampilan dan kompetensi SDM untuk mendukung transformasi dan pertumbuhan TVRI Babel. "(Jumlah) SDM ini tidak bertambah, mungkin hal ini akan sulit. Jika tidak menambahkan SDM-nya, TVRI Bangka Belitung akan sulit menaiki kelas B," kata Nico.

Di sisi lain, politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, Komisi I DPR RI juga akan segera melakukan rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI agar bisa menyelesaikan rencana pembangunan TVRI Babel tahun depan serta dapat mendukung media penyiaran ini menjadi lebih kreatif dan menarik. • gys/sf



TVRI Lampung, Jumat (26/8).

"Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kepala Stasiun TVRI Lampung terkait penyiapan konten siaran di era penyiaran digital dan memberi apresiasi atas berbagai penghargaan yang diperoleh serta berbagai upaya yang telah dilakukan TVRI Lampung. Dari peninjauan, kami menilai TVRI Lampung sudah siap menuju penyiaran kelas A, di mana studio siaran sudah representatif," kata politisi PKS tersebut. • qq/sf



Tim Kunspek Komisi I DPR RI berfoto bersama jajaran Stasiun TVRI Lampung dan Diskominfo Lampung.



Komisi II Serap Aspirasi Masyarakat Terkait **RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya**

etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Komisi II DPR telah mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat Papua Barat di Kota Sorong terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Doli menyampaikan bahwa secara legal, proses pembentukan RUU tersebut telah berjalan selama beberapa bulan terakhir di Komisi II DPR.

"Jadi ini adalah bagian rangkaian dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) kami mendengarkan langsung aspirasi yang selama ini kami dengar dari Jakarta sudah cukup lama, dan kami sudah mempersiapkan RUU-nya. Jadi ini merupakan proses pematangan atau proses tahap akhir dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya," jelas Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Sorong, Papua Barat, Kamis (25/8).

Doli menyampaikan, aspirasi dari masvarakat setempat, vang turut diwakilkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya Lambert Jitmau, menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sebagai DOB. la menegaskan bahwa aspirasi tersebut cukup bulat dan telah mendapatkan dukungan bahkan dari pimpinan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

"Kami sudah menyusun agenda. Yang jelas di masa sidang ini, kami berharap RUU tersebut sudah bisa menjadi UU. Kami di Komisi II DPR, dalam kurang lebih waktu dua minggu, akan sampai di pembahasan Tingkat I, kemudian kami akan sampaikan ke Pimpinan DPR untuk diagendakan di Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi UU di DPR, kemudian kami kirim ke pemerintah," ujar Doli.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemekaran Papua Barat ini merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. "Artinya, dengan lahirnya provinsi baru di Papua Barat ini, bisa mempercepat proses pemerataan pembangunan di Tanah Papua," yakin legislator dapil Sumatera Utara III itu. • ica/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sorong, Papua Barat.



Komisi III Minta **BNPT Tak Pinjam Dana dari Luar Negeri**

III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tidak meminjam dana dari luar negeri pada pembiayaan program dan kegiatan. Sahroni mengingatkan

akil Ketua Komisi

program BNPT, Menteri PPN/ Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menerapkan sikap nasionalis apalagi terkait pinjaman dana.

"Untuk pinjaman dari luar negeri, itu tidak boleh. Kita harus nasionalis, harus dari bank dalam negeri.Kalau kita pinjam dari luar, maka yang untung juga luar negeri. Jadi tidak boleh ada pinjaman luar negeri dalam hal ini," ujar Sahroni saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dan BNPT di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).

Sahroni memberikan alternatif usulan agar pinjaman datang dari skema Kredit Swasta Asing (KSA) dari Bank Milik Negara (Himbara) di luar negeri. Alternatifnya, bisa dengan mengambil pinjaman dari bank milik negara dengan konsep KSA, jadi bank-nya tetap dari dalam negeri. Sebagai contoh: Bank BNI Luar negeri, Bank Mandiri Luar Negeri dan bank Himbara lainnya," jelas Sahroni.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, BNPT sebagai lembaga penanggulangan terorisme harus independen dalam menjalankan tugasnya. Karenanya, dana asing sangat perlu dihindari demi menjaga independensi tersebut. Selain itu, BNPT sebagai lembaga independen harus bebas muncul, termasuk nantinya meminjam uang dari dana asing.

"Apalagi ini untuk menanggulangi terorisme yang berhubungan langsung dengan keamanan negara. Jadi BNPT wajib independen dan tidak boleh menggunakan dana asing dalam programnya," katanya menegaskan. Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi proposal usulan pinjaman luar negeri BNPT senilai Rp2,3 triliun di tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengubah pinjaman itu

> dengan sumber dari dalam negeri. •



FOTO: ANDRI/NVL



Komisi IV Apresiasi Layanan Pengelolaan Sampah 'Waste 4 Change' Kota Bekasi

omisi IV DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Layanan Pengelolaan Sampah 'Waste 4 Change' di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah yang dilakukan perusahaan kewirausahaan sosial (social enterprise) tersebut dalam mengolah sampah yang berdasarkan teknologi menuju penerapan Ekonomi Melingkar (circular economy) dan Indonesia Bebas Sampah.

"Ini langkah bagus saya kira. Kalau negara mau, negara bisa kerja sama dengan perusahaan seperti ini agar ada efisiensi pembiayaan. Jadi, tidak lagi sampah yang ada di tiap kabupaten/kota itu menumpuk. Sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu sudah kecil iumlahnya. Cuma yang belum bisa diolah di sini adalah sampah popok dan pembalut wanita. Nah, pemerintah harus pikirkan bagaimana caranya," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (F-Golkar) usai memimpin kunjungan, Jumat (26/8).



INISIATIF PENGELOLAAN SAMPAH SEPERTI INI DAPAT DITULARKAN KE DAERAH LAIN. SEBAB. TIDAK HANYA **BISA MENGHASILKAN NILAI EKONOMI YANG** BESAR, TETAPI JUGA DAPAT MENGEDUKASI **MASYARAKAT**

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono menilai inisiatif pengelolaan sampah seperti ini dapat ditularkan ke daerah lain. Sebab, tidak hanya bisa menghasilkan nilai ekonomi vang besar, tetapi juga dapat mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah di level hulu, khususnya sampah rumah tangga.

"Saya setuju Waste 4 Change kita undang nanti ke Komisi IV DPR RI. Kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Ini sangat bermanfaat terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sisi lainnya ada nilai tambah bagi mereka semuanya," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Di sisi lain, Endro mengaku respek dengan langkah founder Waste 4 Change Muhammad Bijaksana Junerosano. Sebab, sosok anak muda tersebut, dinilainva penuh kreasi dan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga, Endro menekankan pemerintah daerah harus lebih ramah dalam membuat regulasi, sehingga ekosistem usaha berbasis lingkungan seperti ini dapat lebih menjanjikan bagi anak-anak muda di

"Dari standar kesehatan yang ada di Rumah Pemulihan Material sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan. Biasanya kalau ada sampah ada lalat, tetapi ini tidak ada. Karena ternyata begitu datang sampah, sore harus abis agar tidak ada tumpukan lagi," ielas Endro. • rdn/aha



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau Layanan Pengelolaan Sampah 'Waste 4 Change' di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.





Dukung Mitigasi Penyakit Ikan, **Komisi IV Dorong Penguatan** Kelembagaan BPKIL Serang



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan jajaran BPKIL Serang.

omisi IV DPR RI melakukan monitoring dari sisi saranaprasarana. Sumber Daya Manusia (SDM), serta anggaran Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Melihat tupoksinya yang begitu besar dalam melakukan pengujian mutu dan mitigasi penyakit ikan di Indonesia. Komisi IV DPR RI menilai perlu adanya penguatan kelembagaan BPKIL Serang agar kendala yang dihadapinya selama ini segera mendapatkan solusi dan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun DPR RI.

"Teman-teman Komisi IV sepakat bahwa peningkatan kelas dari kelembagaan sudah harus mulai

ditingkatkan. Bila perlu, ini mungkin namanya meniadi suatu badan tersendiri. Jadi ada kenaikan struktur kelasnya ya di lembaga, katanya dipimpin sekelas eselon tiga ya. Nah ini kita dorong (BPKIL Serang) untuk bisa secepatnya disesuaikan agar naik kelas," ungkap Anggota Komisi IV DPR RI Nur'aeni usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau BPKIL Serang, di Serang, Banten, Jumat (26/8).

Dorongan tersebut diambil usai Komisi IV DPR RI menggelar diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Serang yang diwakili Wakil Bupati Serang serta Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta mitra kerja terkait. Dalam peninjauan dan diskusi tersebut, terungkap

bahwa kelembagaan **BPKIL Serang harus** disesuaikan, karena balai ini merupakan satu-satunya di Indonesia, tapi kurang mendapatkan perhatian pemerintah, dan banyak kendala yang harus diselesaikan.

"Nah ini kan mereka (BPKIL Serang) memiliki tupoksi yang luar biasa sekali, akan tetapi dari keluhan yang disampaikan, menurut saya sih sangat mengkhawatirkan masa depannya.

Bagaimana dari sisi SDM ini harus ditingkatkan, ditambah, karena adanya kegalauan honorer ditiadakan. Sehingga penyuluh serta pegawai honorer yang mengerti di bidang laboratorium juga ini ada info akan diberhentikan," jelas Nur'aeni.

"Nah ini siapa yang akan menggantikan para pekerja-pekerja tersebut, sementara kebutuhan akan tenaga ahli ini kan sulit. Lalu harus ditingkatkan sarana prasarana, baik itu mungkin alat-alat yang mendukung laboratorium juga sudah harus ditingkatkan. Gedungnya juga saya kira sudah tidak layak lah ya, untuk bisa menguji sebanyak berapa ribu (sampel) setiap tahun, ini kan luar biasa," sambung politisi Partai Demokrat itu. • syn/sf



Mengembalikan DAS Kali Bekasi Guna Kendalikan Banjir

erkembangan pembangunan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah menvebabkan perubahan fungsi lahan yang sangat agresif akibatnya kali Bekasi tidak mampu menampung debit hujan yang tinggi. Bahkan lebih dari itu pendangkalan sungai pun telah memperburuk keadaan. Pada akhirnya luapan banjir masuk ke pemukiman penduduk sehingga melumpuhkan aktivitas ekonomi

masyarakat dan kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah Kota Bekasi.

Atas dasar itu, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Dalam kunjungan ini, Komisi V DPR RI meninjau secara langsung pembangunan sarana prasarana infrastruktur khususnya pembangunan normaslisasi kali Bekasi untuk pengendalian banjir dan menginyetarisasi bila ada kendala atau usulan lain yang terkait dengan

pembangunan tersebut.

"Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja ini dalam rangka mengembalikan fungsi dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi di Kota Bekasi dan juga untuk melaksanakan sebagian fungsi dan tugas DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan," papar Andi Iwan di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/8).

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa normalisasi Kali Bekasi ini sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Bekasi semenjak banjir besar yang melanda setiap tahunnya. Kejadian banjir tiga tahun belakangan ini di wilayah Kota Bekasi, yaitu bulan Januari 2020, bulan Februari 2021 dan bulan Juli 2022, di mana peningkatan wilayah yang terdampak banjir semakin luas, menyebabkan lumpuhnya sarana prasarana infrastruktur, pelayanan umum ke masyarakat dan merendam wilayah perumahan yang menjadi pemukiman masyarakat.

"Kehadiran Komisi V di saat ini, ingin mengetahui secara langsung atas permasalahan yang ada, dan menggali informasi, atas upaya optimal Kemen PUPR, dalam mengatasi permasalahan ini, agar tidak terulang lagi di kemudian hari, uiar Andi Iwan. • ssb/aha





Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau normalisasi Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pembebasan Lahan Jadi Faktor Molornya Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3

nggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar stakeholder, termasuk dengan pemerintah daerah dikarenakan progress pembangunan Jalan Tol

Cinere-Jagorawi Seksi 3 sudah tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Salah satunya terkait dengan molornya pembebasan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 ini.

"Saya melihat ini karena lemahnya koordinasi dengan stakeholder yang lain, termasuk dengan pemerintah daerah. Sehingga sering pemerintah pusat atau para investor ketika melakukan pembangunan jalan tol begitu ada masalah baru menghubungi pemerintah daerah. Sehingga kita harapkan koordinasi lebih baik lagi," jelas Suryadi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik





Komisi V Awasi Revitalisasi Terminal Pakupatan

erminal dengan fungsi utama sebagai penyelenggaraan transportasi, tidak hanya sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang. Tetapi juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang demi melancarkan arus perpindahan angkutan.

Oleh karena itu, pada kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik di Terminal Pakupatan, Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan yang detail dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terkait kegiatan revitalisasi Terminal Pakupatan yang sedang dibangun sekarang.

"Kehadiran Komisi V di kota Serang ingin melihat bagaimana progres pembangunan revitalisasi terminal pakupahan terminal tipe A yang paling tinggi, diharapkan kehadiran terminal ini kalau kita lihat desain dan jadinya seperti apa maka menurut saya ini bisa menjadi



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat memimpin Kunspek Komisi V DPR RI ke Terminal Pakupatan.

suatu ikon untuk kota Serang dan ini juga menjadi contoh untuk terminal daerah lain," papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw di Serang, Banten, Jumat (26/8).

Roberth menjelaskan penyelesaian Terminal Tipe A Pakupatan ini selesai pada Desember 2022, atau paling lambat Januari 2023 sudah bisa beroperasional. la melanjutkan, kementerian perhubungan juga harus mengawasi supaya bangunan terminal dapat bertahan lama hingga puluhan tahun.

"Pembangunan terminal ini perlu dilakukan pengawasan kalau saya melihat masih ada hal-hal yang harus diawasi dan kita lihat kalau targetnya menurut saya Desember optimistis bahwa ini bisa selesai karena dasar pembangunan ini sudah dilakukan, situasi ekonomi sekarang ini para pengusaha bersaing begitu ketat maka jangan korbannya pembangunan fisik, itu yang harus kita jaga kualitas," jelas politisi Partai NasDem itu. • afr/aha



Komisi V DPR RI meninjau Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3, di Depok, Jawa Barat, Jumat (26/8).

Suryadi mengatakan, kendala yang dialami untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi ini lebih banyak terkait dengan pembebasan lahan milik warga yang terkena pembangunan, seperti belum adanya kesepakatan harga ganti rugi. "Tetapi kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat, tetap akan sulit.

Karenanya kita minta supaya koordinasi dengan para pihak ini bisa lebih cepat," sarannya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memberi catatan khusus terkait kualitas pembangunan jalan tol yang sudah dibangun maupun masih dalam progres pembangunan. "Kita berharap kualitas pembangunan jalan tol ini harus memenuhi standar keselamatan. kenyamanan dan keamanan sesuai dengan standar pelayanan minimum," tutup Suryadi. • ron/sf



Investasi Menyebar ke Luar Jawa, Komisi VI Apresiasi Kinerja Kementerian Investasi

akil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal vang diapresiasi adalah laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM yang dinilai baik, karena cukup lengkap disertai dampak keuangan terhadap peningkatan kinerja kementerian secara keseluruhan. Sehingga Komisi VI DPR RI dapat memahami secara menveluruh kineria Kementerian Investasi/BKPM.

"Sekurang-kurangnya capaian kinerjanya terpapar di (laporan keuangan) sini dan capaian kinerjanya dicapai dalam masa yang tidak mudah menurut saya, masa pandemi, masa turbulensi perekonomian global, tetapi Indonesia ada kenaikan investasi yang sangat signifikan," paparnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Kemudian, adanya pergeseran arah investasi dari Jawa ke luar Jawa juga merupakan hal yang patut diapresiasi. Sebab, menurutnya hal tersebut sebenarnya tidak mudah dilakukan. "Mengajak orang untuk berinvestasi ke luar iawa itu sama sekali tidak mudah, karena kendala infrastruktur, kendala

tenaga kerja, kendala jarak yang jauh dikoordinasikan dari pusat pemerintahan dan lain sebagainya," jelas Sarmuji.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu berharap ke depan, perkembangan investasi akan lebih menggembirakan lagi. Untuk itu. Kementerian Investasi diharapkan tidak hanya memperhatikan Penanaman Modal Asing (PMA), saja namun juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

memang penting namun, PMDN juga merupakan bagian yang tak terpisahkan yang juga harus mendapat perhatian.

"Tentu yang kita perhatikan bukan hanya PMA, tapi PMDN juga harus kita perhatikan memberikan kemudahan, menstimulir orang Indonesia untuk mau berinvestasi, berbudaya investasi itu juga penting. Saya meyakini sebenarnya uang orang Indonesia itu banyak, PMDN juga penting untuk kita perhatikan,"





pendidikan.



Sugeng Suparwoto Sebut Selama Ini **Subsidi BBM Tidak**

etua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi Bahan Bakar Umum (BBM) tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu sehingga perlu dialihkan. Menurutnya, bahkan total BBM subsidi yang tak tepat sasaran mencapai sekitar 70-80 persen.

"Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi vang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Sabtu (27/8).

Lebih lanjut menurut Sugeng, porsi terbanyak pengguna Pertalite



KENAIKAN HARGA BBM HARUS DIIMBANGI **DENGAN PROGRAM** BANTUAN SOSIAL. BISA DALAM BENTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT), BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi. Selain tidak tepat sasaran, Sugeng juga menerangkan, bahwa saat ini subsidi BBM sudah sangat memberatkan. Untuk itu, iika BBM tidak dinaikkan maka bisa mempengaruhi keuangan negara. Alasannya, karena harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022.

Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian. "Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price

(ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi ratarata 104,9 dolar AS/barel," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Menurut Sugeng, kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan program bantuan sosial. Bisa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau lainnya. "Sebab naiknya harga BBM bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, dan program bantuan sosial ini untuk mencegah terjadinya inflasi," jelas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII tersebut. • we/sf



Komisi VIII Setujui 5 Dewas BPKH Periode 2022-2027

etua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan. berdasarkan musyawarah mufakat Pimpinan dan Kapoksi Komisi VIII DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari unsur masyarakat pada Senin-Selasa, 29-30 Agustus 2022. Komisi VIII DPR RI telah menetapkan Anggota Dewas BPKH periode tahun 2022-2027.

Dalam rapat Internal Komisi VIII DPR RI, ditetapkan 5 orang terpilih sebagai Dewas BPKH, yakni Deni Suardini, Dr., S.E. Akt. M.M. CFrA. CA. QIA. CGCAE.. Heru Muara Sidik. Ak. CA. CMA. MM. QIA., M. Dawud



KOMISI VII DPR RI TELAH MENETAPKAN ANGGOTA DEWAS **BPKH PERIODE TAHUN** 2022-2027.

Arif Khan., Dr., Mulyadi, Dr., S.E, M.M. M.Si. Akt. CA., CPMA, SAS. dan Rojikin, Dr., S.H, M.Si. QIA.

"Selamat bagi yang sudah mengikuti seleksi, kepada yang terpilih kami berharap menjalan tugas dengan amanah. Karena bagi kami, bapak-bapak adalah benteng umat yang telah menginvestasikan dana

kepada BPKH," kata Ashabul usai rapat Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Diungkapkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dua faktor yang menjadi pertimbangan Komisi VIII ialah kemampuan para calon di bidang syariah dan kemampuan di bidang keuangan. "Dua poin utama ini yang menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Dari 10 calon Dewas BPKH, hampir semua memiliki kompetensi yang baik, tetapi kami harus memilih 5 (anggota). Insya Allah kami yakin mereka (5 Dewas terpilih) mampu mengawal dana haji agar para pelaksana pengelola dana haji sesuai regulasi," tutupnya. • rnm/sf





Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027.



Komisi IX Berharap Penghapusan **Tenaga Honorer** Tidak Terburu-buru

enghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023. Menanggapi keputusan penghapusan tenaga honorer, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menjelaskan, bahwasanya Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan memperjuangkan keputusan tersebut agar bisa ditunda, supaya tidak terburuburu. Pimpinan seluruh Komisi di DPR RI akan bersurat kepada Pimpinan DPR RI untuk segera

bertemu dan membicarakan persoalan tersebut.

"Kami di Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi XI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan membicarakan persoalan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Dari hasil yang kami sepakati, kami memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru. Pimpinan Komisi akan bersurat kepada Pimpinan DPR untuk bertemu dan membicarakan persoalan tersebut," pungkas Felly saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait di Medan, Jumat (26/8).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, Anggota DPR RI mempunyai kekhawatiran yang sama. Pasalnya, saat ini sebanyak 575 Anggota DPR RI. memiliki tenaga honorer yang masing-masing mempunyai 7 staf lima tenaga ahli dan dua staf ahli yang harus diperjuangkan. Untuk itu Felly mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperjuangkan dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak tenaga honorer maupun kontrak.

Felly menjelaskan, adapun tujuan lain dari Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Sumut ini adalah guna memperjuangkan tenaga honorer maupun kontrak kesehatan yang sudah mengabdi di lingkungan pemda se-Sumut. "Saya berharap, kepada pemerintah daerah bisa menerapkan aturan yang tertera dalam UU Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ini penting sekali guna memberikan hakhak mereka tenaga honorer kesehatan sebagai garda terdepan di bidang kesehatan," harap Felly yang merupakan legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara itu. • rni/sf



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Medan, Sumut,

Penghapusan **Tenaga Non-ASN**

Harus Dirumuskan dengan Baik



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

akil Ketua Komisi IX DPR RI Fmanuel Melkiades Laka Lena menilai, penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai sektor, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK, akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik.

"Kebijakan ini berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Walaupun kebijakan ini maksudnya baik, tapi kalau dilaksanakan tidak tepat akan melumpuhkan proses pelayanan publik, meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan permasalahan lainnya," kata Melki usai memimpin pertemuan Tim Panja Kesehatan Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS Komisi IX DPR RI dengan Pemprov Kalimantan Timur, di Balikpapan, Jumat (26/8).

Untuk itu, menurut Melki. kebijakan pengahapusan tenaga non-ASN perlu dirumuskan dengan tepat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Komisi IX DPR RI. masih kata politisi Partai Golkar tersebut, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas Komisi di DPR RI agar kebijakan terlaksan ketika akan diimplementasikan.

"Kami menilai perlu percepatan dalam penuntasan program seleksi tenaga honorer menjadi PPPK agar ada kepastian nasib dari tenaga honorer yang selama ini terkatungkatung karena ketidakpastian langkah pemerintah. Maka kami mendorong pembentukan Panitia Khusus lintas Komisi di DPR RI," kata Melki legislator dapil Nusa Tenggara Timur II tersebut. • rnm/sf





Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih

Komisi IX Soroti **Minimnya Kepesertaan BPJS TK Tenaga Honorer**

kepersertaan BPJS

akil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong

Ketenagakerjaan ditingkatkan guna mewujudkan perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja honorer. Hal ini disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terhadap



Eva Stevany Dukung Perpustakaan Digital Berbasis Inklusi Sosial

nggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba mendukung implementasi perpustakaan digital berbasis inklusi sosial. Hal tersebut menjadi penting, sebab perpustakaan digital ini belum dirasakan masvarakat. terutama yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) karena terbatasnya sarana dan prasarana (sarpras).

"Padahal, masyarakat di daerah 3T ini ini memiliki kerinduan atau antusias yang luar biasa semangat yang ingin membaca dan ingin mengetahui perkembangan terkini yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Eva dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI beserta jajaran, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021

di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).

Maka dari itu, politisi Partai NasDem ini berharap Perpusnas meningkatkan kerja sama dengan kementerian terkait dalam pengadaan jaringan dan perangkat komputer. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan masyarakat terpacu menjadi Gemar Membaca.

"(Selain itu juga) memudahkan dalam mengakses pengetahuan dan juga keterampilan yang dapat menjadi peluang usaha mandiri inovatif dan berdaya saing yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah kegiatan," lanjut legislator dapil Sulawesi Selatan III itu.

Dirinya mengaku, ketika mengunjungi dapilnya, Eva mendapat banyak masukan terkait dengan bantuan buku bacaan dan buku bergambar. Terlebih, hal tersebut juga sejalan dengan pidato Presiden Joko Widodo pada



Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba.

saat Sidang Tahunan pada 16 Agustus 2022 terkait penguatan pendidikan karakter yang menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional.

"Salah satunya penguatan kualitas layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). kehadiran Perpusnas di (dapil) sini saya rasa sangat penting. Minimal bisa memfasilitasi buku bacaan buku bergambar untuk anakanak usia dini untuk mengasah motorik halus yang sangat perlu dilatih saat anak-anak masuk di ieniang PAUD," harap Eva kepada Perpusnas RI. • hal/sf



pengawasan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja honorer bidang kesehatan di Jawa Barat.

"Ternyata masih sangat sedikit kepesertaan yang ikut Jamsostek, karenanya kepesertaannya masih perlu kita dorong lagi," ujar Mufidah saat memimpin Rapat Komisi IX DPR RI bersama Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaia dan jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya di Bandung, Jumat (26/8).

Polisi PKS ini menyampaikan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak pekerja sesuai **UU Sistem Jaminan Sosial** Nasional. Karenanya, dibutuhkan political will yang kuat terhadap pelaksanan perlindungan tenaga honorer. Mengingat, kepastian penganggaran Pemprov Jabar untuk perlindungan tenaga kerja honorer belum menyeluruh.

Komisi IX DPR RI juga menyoal kesiapan Pemprov Jabar terkait penghapusan tenaga honorer. Menurutnya, DPR terus mengawal agar kebijakan tersebut tetap berkeadilan. "Kita semua satu pandangan bahwa kita perlu memberikan advokasi terhadap teman-teman tenaga honorer khususnya di bidang kesehatan karena mereka meniadi uiung tombak di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua," ujar Kurniasih. • ann/aha





Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya.

Dorong Prestasi Kerja PNS, Willy Aditya **Minta Skema Dana Pensiun Dikaji**

Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah mengenai usulan skema dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini diungkapkannya terkait dengan rencana pemerintah mengubah skema dana pensiun dari sistem pay as you go menjadi fully funded bagi pensiunan PNS.

"Rencana perubahan skema dana pensiun PNS perlu dikaji lebih matang dan empirik. Dengan sistem gaji PNS saat ini yang juga memberi remunerasi terhadap prestasi kerja maka sewajarnya

sistem pensiun ke depan juga memperlihatkan konsentrasi pemerintah untuk mendorong prestasi kerja PNS agar benefit yang mereka terima juga sesuai dengan kontribusi kerjanya bagi negara," ujar Willy dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Rabu (31/8).

Saat ini, skema pensiun PNS menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. Dalam skema pay as you go, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ditambah dengan APBN.

Menurut Willy, skema pay as you go (PAYG) yang sudah dipakai sejak tahun 50-60an lebih kental diarahkan dalam nuansa politik dengan dalih jaminan sosial. "Hasilnya kita lihat sendiri bagaimana pengelolaan dana pensiun ini terus menjadi 'beban' pembiayaan negara," tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI tersebut.

Willy menambahkan, kajian pengubahan skema dana pensiun juga perlu mempertimbangkan analisis faktor ekonomi yang berkembang. Politisi Partai NasDem tersebut mencontohkan, antara lain: market. investasi. inflasi. sustainabilitas dan lain-lain. "Tujuannya adalah agar pengelola dana pensiun dapat lebih produktif dan optimal memberi layanan. Bukan sekadar mengumpulkan dana dari PNS lalu cari aman dalam pengelolaan dan manajemennya berharap gaji besar," tegas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu menutup pernyatannya. • uc/sf





Tekankan Peran Perempuan dalam Perdamaian Dunia,

Agustina Pramestuti Soroti Resolusi DK PBB 1325

"Sejalan dengan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan UNSCR 1325, seharusnya, bagaimana pun. melampaui peningkatan keterwakilan, dan partisipasi perempuan dalam mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan resolusi konflik," tutur Agustina.

Namun, lanjut dia, UNSCR 1325 juga memastikan perannya dalam mengatasi kebutuhan khusus perempuan selama repatriasi, rehabilitasi pemukiman, reintegrasi dan rekonstruksi konflik, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Ia menjelaskan komitmen Indonesia dalam

etua Delegasi Pertemuan Antar-Parlemen Perempuan ASEAN (WAIPA) Indonesia Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan tentang peran parlemen dalam memajukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat virtual Komite Koordinasi Perempuan Anggota Parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA).

Pada kesempatan itu, Agustina menyoroti Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (UNSCR 1325) yang menekankan peran penting perempuan dalam resolusi konflik dan proses perdamaian. "Konflik yang terjadi di dunia saat ini telah membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perempuan, implementasi resolusi yang efektif tetap mendesak," kata Agustina usai rapat virtual di Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (30/8).

Untuk itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini mendorong peran perempuan dalam proses utama perdamaian. Menurut Agustina, partisipasi dan

Virtual Meeting of Coordinating Committee

Foto bersama Delegasi Pertemuan Antar-Parlemen Perempuan ASEAN (WAIPA) Indonesia.

keterwakilan perempuan efektif dalam pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik.

Adapun Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB (UNSCR 1325) menunjukkan partisipasi perempuan dalan meningkatkan peluang perjanjian damai untuk bertahan setidaknya dua tahun sebesar 20 persen. Selain itu, kemungkinannya mencapai 35 persen untuk perjanjian perdamaian yang bertahan sekitar 1,5 tahun.

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk memastikan peran luas perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

"Dalam hal ini, saat ini Indonesia merupakan penyumbang terbesar ketujuh pasukan pemelihara perdamaian perempuan di dunia," lanjut Agustina. Indonesia, kata dia, menyumbang setidaknya 149 wanita penjaga perdamaian yang bertugas pada sejumlah misi perdamaian PBB. • aas/aha

BAKN Harap **Ada Perbaikan** Regulasi Ekspor CPO



Foto bersama Tim Kunker BAKN DPR RI dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

etua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Wahyu Saniava mengatakan bahwa harus ada perbaikan regulasi terkait dengan ekspor minyak kelapa mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Politisi Partai Demokrat itu menilai adanya peningkatan pada bea keluar yang begitu tinggi merupakan dampak dari naiknya harga CPO.

Demikian disampaikan Wahyu usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

RI terkait Kepabeanan dan Cukai, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jawa Timur, Selasa (30/8).

"Kita sudah melihat bahwasannya ada hal yang menarik, terutama terkait bea keluar, di mana kita lihat ada peningkatan yang luar biasa tinggi dari hampir 1000 persen malahan, nah kita lihat di sini bahwasannya kenaikan bea keluar ini adalah dampak dari naiknya harga CPO, harga minyak kelapa sawit," ujar Wahyu.

Perbaikan regulasi tersebut, lanjut Wahyu, agar nantinya ekspor CPO dapat memberikan manfaat lebih bagi negara. "Karena pada harga tertentu, ekspor CPO ini negara tidak menerima manfaat, jadi kita berharap kedepannya berapapun harga CPO, pemerintah republik itu harus ada terima manfaat. Jadi

kalau misalnya harga naik kita dapat windfall, tetapi pada harga dasar kita juga bisa menerima manfaat," jelas legislator dapil Sumsel I tersebut.

Lebih lanjut dalam kunjungan tersebut, BAKN DPR RI juga mendalami mengenai penerimaan cukai hasil tembakau yang cukup besar bagi negara serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekspor dan impor khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak. "Kalau pita cukai kan kita mendalami apa yang sudah kita kejar selama ini kan, mudahmudahan dengan ini kita bisa segera memutuskan perbaikan apa yang perlu dilakukan agar kedepannya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan lebih besar untuk negara," harap Wahyu. • bia/sf



BURT DPR Tinjau Kesiapan RS Airlangga Jombang Layani Peserta Jamkestama

etua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso bersama Tim Kuniungan Kerja BURT DPR RI menggelar pertemuan dengan Direksi Rumah Sakit (RS) Airlangga Jombang. Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan pengawasan terhadap RS Provider Jasindo tersebut dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya.

"Jadi. hari ini BURT DPR RI melakukan Kunker dalam rangka melakukan fungsi pengawasan ke RS Airlangga Jombang. Di sini kami (BURT DPR RI) juga harus memastikan bahwa RS di daerah vang meniadi provider Jasindo harus RS yang paling representatif untuk bisa dengan cepat memberikan pertolongan pertama kepada Anggota DPR dan keluarganya, serta masyarakat Jombang,» ungkap Agung usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Direksi RS Airlangga

Jombang, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (25/8).

Dalam kesempatan ini, kata Agung, paparan yang telah disampaikan oleh Direksi RS Airlangga Jombang sudah cukup lengkap. Salah satu hal yang disampaikan bahwa RS Airlangga sudah memiliki banyak dokter spesialis.

"Nah dan informasi dari masvarakat Jombana pun mengatakan bahwa RS Airlangga ini merupakan RS yang terkenal di daerah Jombang dengan pelayanan dan pengobatan yang baik," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat itu pun mengartikan bahwa RS Airlangga Jombang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai RS rujukan yang tepat bagi Anggota DPR beserta keluarganya jika ada yang mengalami ganggu kesehatan pada saat berkunjung di Jombang. "Ada semangat dan optimis dari RS Airlangga Jombang untuk dapat semakin optimal dalam melayani Anggota DPR serta masyarakat Jombang kedepannya," jelas Agung. • hnm/sf



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan Direksi RS Airlangga Jombang.









Wakil Ketua BURT DPR RI Nasril Bahar saat memimpin Tim Kunker BURT DPR meninjau Primaya Hospital di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/8). FOTO: JAKA/NVL



Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 DPR/MPR RI dengan menggelar upacara bendera di Lapangan Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). FOTO: RUNI/NVL







Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar acara tumpengan usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 DPR RI dan MPR RI di selasar Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (29/8). FOTO: RUNI/NVL



